

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Asshiddiqie, Jimly. *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Konstitusi Press, 2019.
- Asshiddiqie, Jimly. *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011.
- Atmosudirjo, Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998.
- Hadjon, Philipus M. dkk. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 2007.
- HR, Ridwan. *Hukum Administrasi Negara*. Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Indrati, Maria Farida. *Ilmu Perundang-undangan*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Indroharto. *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2004.
- Kusdarini, Eny. *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UNY Press, 2019.
- Lotulung, Paulus E. *Hukum Administrasi Negara*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
- Manan, Bagir. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Hukum FH UII, 2005.
- Manan, Bagir. *Wewenang Pemerintahan dalam Hukum Administrasi Negara*. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2000.

- Marbun, S.F. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2018.
- Muchsan. *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 1997.
- Pratiwi, Cekli Setya dkk. *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2016.
- Rahardjo, Satjipto. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas, 2003.
- Simorangkir, J.C.T. *Aparatur Sipil Negara*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2019.
- Utrecht, E. *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru, 1988.
2. Jurnal
- Handayani, R. "Kewenangan Pejabat Pelaksana Tugas (Plt) dalam Pengambilan Keputusan Strategis Pemerintahan Daerah." *Jurnal Hukum Administrasi dan Pemerintahan Daerah* 8, No. 2 (2020).
- Himawan, Mohammad Hilmi dkk. "Ratio Decidendi Terhadap Amar Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pada Perkara Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Aparatur Sipil Negara Terpidana Korupsi." *PATTIMURA Legal Journal* 1, no. 1 (2022).
- Indradi (Kusuma). "Kewenangan Pejabat Sementara dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara." *Jurnal Hukum Administrasi Negara* 6, No. 2 (2019).
- Kesmawati, Putri Diah Ayu et al. "Hubungan Asas Praduga Rechtmatig Dengan Aupb Dalam Putusan Nomor 34/G/2020/Ptun. Jbi Tentang Pemecatan ASN." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 4, no. 1 (2026).
- Nadir, et al. "Implementasi Negara Hukum Indonesia dalam Kualifikasi Tindakan Pejabat TUN sesuai AUPB." *Jurnal Pendidikan Tambusai* (2025).
- Nasrullah, Nasrullah. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Menguji Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang." *Politea: Jurnal Politik Islam* 4, no. 1 (2021).

- Nugraha. "Kewenangan Pejabat Administrasi dalam Pemberhentian ASN yang Terlibat Tindak Pidana Korupsi." *Jurnal Hukum dan Etika Publik* 8, no. 1 (2023).
- Nugroho, Tri Cahyo et al. "Peran Hukum Administrasi Negara Sebagai Ilmu Pengetahuan Dalam Membangun Transparansi Dan Akuntabilitas Sektor Publik." *Journal of Administrative Law* 24, no. 2 (2025).
- Pratama. "Kewenangan Pejabat Pemerintahan dalam Perspektif Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)." *Jurnal Administrasi Negara* 10, no. 1 (2021).
- Rahmadani. "Asas Legalitas dalam Praktik Hukum Administrasi Pemerintahan di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik* 5, no. 3 (2018).
- Rahmania, A dan Umam, M. K. "Implikasi Terhadap Normatifisasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak terhadap Praktik Administrasi Pemerintahan." *Journal of Dual Legal Systems* 2, No. 2 (2025).
- Ramadhani, Nurul Suci et al. "Peran Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Dalam Penyelesaian Sengketa Aparatur Sipil Negara (ASN)." *Orasi: Jurnal Ilmu Politik Dan Sosial* 2, no. 2 (2025).
- Rini. "Tanggung Jawab Hukum Pejabat Administrasi Negara dalam Keputusan Maladministrasi." *Jurnal Ilmu Hukum dan Pemerintahan* 7, no. 1 (2020).
- Saputra, D. "Penerapan Asas Legalitas dan Asas Proporsionalitas dalam Tindakan Pejabat Administrasi Negara." *Jurnal Ilmu Hukum dan Kenegaraan* 10, no. 1 (2022).
- Siregar. "Analisis Yuridis terhadap Penyalahgunaan Wewenang dalam Perspektif Hukum Administrasi Pemerintahan." *Jurnal Ilmu Hukum Negara* 9, no. 1 (2021).
- Sobari, Ahmad. "Menguji AUPB sebagai Dasar Gugatan PTUN." *Populis: Jurnal Sosial dan Humaniora* (2023).
- Solechan. "Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam Pelayanan Publik." *Administrative Law & Governance Journal* 2, no. 3 (2019).
- Syahidin, Rosyad dan Dewi Sulastri. "Peran Dan Wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Penyelesaian Sengketa Kepegawaian (Aparatur Sipil Negara)." *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM* 18, no. 02 (2025).

Syam, Fauzi, Helmi, and Fitria. "Pengujian Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil Di Peradilan Administrasi." *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE* 20, no. 1 (2020).

Wibowo. "Analisis Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Kewenangan Pejabat Sementara dalam Pemerintahan Daerah." *Jurnal Yustisia* 12, no. 2 (2022).

Wiyardi, Uyan dkk. "Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Secara Tidak Hormat Karena Melakukan Kejahatan Jabatan." *Binamulia Hukum* 12, no. 2 (2023).

Yuki, Muhamad Firdaus dkk. "Tinjauan Aspek Keadilan dalam Pemberhentian Tidak dengan Hormat atas Aparatur Sipil Negara." *Yustisi: Jurnal LPPM Universitas Ibn Khaldun Bogor* 11, no. 2 (2024).

Yusuf. "Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Penyelesaian Sengketa Kewenangan Pejabat Administrasi Negara." *Jurnal Peradilan dan Hukum* 11, no. 2 (2024).

3. Peraturan Perundang-Undangan & Website

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 51 Tahun 2009).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2009).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 jo. PP Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016.

Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 2/SE/VII/2019 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian.

Surat Edaran Kepala BKN Nomor 1/SE/I/2021 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-3712 Tahun 2019 tentang Pengesahan Pemberhentian Bupati Cirebon.

4. Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 526 K/TUN/2020.

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 160/B/2020/PT.TUN.JKT.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 123/G/2019/PTUN.BDG.

Putusan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Bandung Nomor 119/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Bdg.